

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Dalam sejarah Yunani Kuno, Xenophon (430-349 BC) menggunakan *Psychological warfare* sebagai usaha untuk memperlemah lawan. Pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I, terorisme telah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Di pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak muncul dari penganut anarkhi di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang berkuasa saat itu dengan senjata api atau bom.

Terorisme secara potensial terdapat di berbagai masyarakat dunia. Hanya aktualisasinya sangat tergantung pada kerawanan kondisi, ekonomi, politik, dan psikologis. Pada abad ke-20 terjadi perubahan besar-besaran dalam motivasi yang mendasari dunia terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan maupun kiri dalam spectrum ideologi suatu negara. Kemajuan teknologi merupakan alat pembunuh baru yang memberikan keleluasaan serta kemudahan bagi teroris untuk melakukan kegiatan terornya (Adjie, 2005).

Pada perkembangannya istilah terorisme di pakai dalam *space* (ruang) yang lebih luas. Karena aksi yang dilakukan oleh para teroris semakin meluas melewati batas-batas satu wilayah negara, akibatnya ancaman kekerasan yang menyertai aksinya dirasakan lebih mengglobal, artinya wilayah-wilayah ikut merasa terancam. Terorisme Internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar ketentuan, diplomasi

internasional dan perang tetapi setiap terorisme mempunyai pengaruh dalam persoalan internasional, tidak peduli apakah ia hanya kelompok marginal atau kelompok teroris secara tidak langsung. Tindakan terorisme juga dapat dikatakan internasional jika ia secara diam-diam berkolaborasi atau beraliansi sesama teroris dan pemerintah, serta dengan gerakan terorisme di negara lain. Singkatnya, terorisme menjadi internasional dengan beberapa tindakan atau yang mendukungnya, antara lain:

- 1) Secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri.
- 2) Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara.
- 3) Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain. (diunduh dari situs www.dewitri.wordpress.com, tanggal 15 Januari 2013)

Dalam Istilah teror atau dalam bahasa Perancis, *Le Terreur* adalah istilah yang digunakan para pejuang revolusi perancis atas tindakan anarkis, kebuasan atau pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang ketika berlangsungnya revolusi perancis dari tahun 1793-1794. Sedangkan terorisme adalah usaha-usaha atau aktivitas untuk menciptakan rasa takut yang mendalam melalui upaya-upaya pembunuhan, penculikan, pemboman dan tindak kekerasan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against Humanity*) karena setiap aksi terorisme dinilai melanggar hak-hak asasi (*Human Right*) seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari rasa takut dan keamanan. Mendefinisikan terorisme merupakan perkara yang rumit, sebab ia merupakan persoalan moral, dan penilaiannya sangat beragam bagi tiap orang. Upaya pendefinisian terorisme telah diupayakan oleh berbagai pihak, terutama Amerika Serikat yang sangat berkepentingan dalam upayanya dengan apa yang dinamakan Perang Global Melawan Terorisme. (Diunduh dari situs www.dephan.go.id, tanggal 15 Januari 2012)

Defenisi yang umum digunakan yaitu penggunaan kekerasan oleh individu/kelompok demi suatu kepentingan yang lebih besar, biasanya kepentingan politik. Defenisi ini digunakan untuk menggambarkan aksi-aksi teror dilakukan oleh sekelompok minoritas yang merasa telah diabaikan hak atau mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Ketidakmampuan untuk melawan secara langsung membuat mereka melakukan aksi-aksi teror agar

keinginan mereka dapat dipenuhi. Menurut konvensi PBB tahun 1937 bahwa terorisme merupakan segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud dan tujuan menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. (Dinduh dari situs www.buletin.litbang.dephan.go.id, tanggal 20 Februari 2013)

Berdasarkan literatur ilmu politik, politik teror memiliki empat komponen yaitu :

Pertama, kekerasan adalah bagian yang dibutuhkan dalam membuat aksi politik. Kekerasan, apalagi yang dramatis, menjadi strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian dunia. Semakin dunia memberi perhatian, semakin sukses aksi politik teror. Pesan politik yang hendak mereka sampaikan jauh lebih bergema setelah perhatian public dapat diraih; *Kedua*, tujuan menghalalkan cara. Seringkali dibalik teror aneka aksi teror ada tujuan mulia. Tujuan itu dapat berupa misi ideology, bahkan keagamaan. Mungkin pula tujuannya adalah bagian dari perjuangan politik sebuah kelompok yang tertindas untuk dapat meraih apa yang menjadi haknya. Namun politik teror menghalalkan segala cara sejauh itu efektif untuk mencapai tujuan. Bahkan jika untuk mencapai tujuan itu diperlukan korban manusia, termasuk korban dari rakyat tidak berdosa, itupun dapat di tempuh; *ketiga* adalah gerakan terselubung. Aksi teror dilakukan dalam sebuah jaringan kerja yang secara sengaja disembunyikan dibawah permukaan. Mereka tidak mempercayai mekanisme politik konvensional dapat memenuhi tercapainya aspirasi politik yang mereka perjuangkan. Politik non konvensional dipilih karena dianggap satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk turut bicara dan didengar; *Keempat*, militansi dan fanatisme pelaku. Berbeda dengan politik konvensional, politik teror di dukung personel yang tingkat militansinya amat tinggi. Apalagi jika misi utama kelompok itu berwarna keagamaan atau kemerdekaan sebuah bangsa. Aksi nekat yang berakhir dengan kematian pelaku seperti bunuh diri adalah hal yang biasa.(Budihardjo, 2001:52)

Kehidupan sosial politik yang timpang menimbulkan frustasi dan keputusasaan yang mendorong orang menjadi agresif dan melakukan teror. Sementara itu, tidak sedikit yang menggunakan teror sebagai senjata perjuangan untuk mengejar tujuan politik. Tidak jarang, aksi terorisme juga dilakukan oleh fanatik atau militant yang bersifat religius. Sikap militansi ini bias timbul dalam setiap agama, tanpa terkecuali. Kelompok militan, fanatic dan radikal bias timbul di lingkungan agama Hindu, Budha, Sikh,

Yahudi, Katolik, Kristen, Islam, dan sebagainya. Golongan fanatik ini cenderung menegasikan yang lain (Hasin, 1999)

Menurut Lacquer (1979), “Terorisme berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat”. Sementara Max Bellof (1979) menunjukkan:

“Bila di dalam masyarakat ada ketidakadilan, atau bila ada bagian atau kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan secara adil dibidang politik, ekonomi, maupun sosial cultural. Ada sebab-sebab yang menimbulkan keridakpuasan sosial yang bersifat akumulatif, kian hari kian menumpuk, yang pada mulanya selalu diawali oleh hal sepele. Semula berupa keluhan (grivances) mengenai satu kebijakan. Bila keluhan itu tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, atau tidak mendapatkan jalan keluarnya, keluhan itu mudah berkembang ketaraf yang lebih jauh yaitu keresahan sosial (Maulani dkk, 2003:44-45)”.

Dalam literatur politik dunia konsep terorisme diartikan secara berbeda-beda, tergantung yang mendefinisikan. Tidak hanya dari aspek politik dan keamanan tetapi juga ideologi dan keyakinan keagamaan yang diakibatkan banyak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Salah satu definisi tentang terorisme yang diartikan sebagai “*Politically motivated violence against no-combatants and designed to instill fear in a target audience*”. Dalam definisi ini, berisi maksud tentang motivasi politik dalam resistensi terhadap sistem kekuasaan domestik dan internasional serta dominasi politik dan ekonomi yang tidak dapat diterima dan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan secara radikal dan menyeluruh. Resistensi terhadap sistem kekuasaan tertentu merupakan unsur yang membedakan terorisme dari tindakan kriminal biasa yang hanya sebatas keuntungan atau balas dendam. Untuk menarik perhatian publik melalui media massa maka aksi terorisme ditujukan kepada penduduk sipil dalam jumlah besar demi menciptakan kepanikan dan tekanan kepada otoritas domestik dan internasional. Kegley dan Wittkopf juga mengartikan terorisme sebagai “*Premeditated politically motivated violence perpetrated*”

against noncombatant to influence an audience". Dalam definisi ini menekankan aspek resistensi terhadap kekuasaan atau dominasi represif juga menarik perhatian dan aksi terorisme adalah kegiatan yang terencana dengan matang dan beroperasi secara rahasia didalam suatu negara yang berdaulat (Jemadu, 2008).

Serangan terorisme 11 September 2001 di New York dan Washington DC memperlihatkan penggunaan teknologi tinggi oleh kaum teroris. Aksi terorisme di AS itu menjadi sebuah tragedi yang dipertontonkan di depan publik dunia. Efek publikasi oleh media massa sangatlah tinggi. Sampai abad ke 18, tindakan teror masih berkisar pada tindakan penyiksaan, pembuangan, penculikan, pembunuhan, dan penyitaan harta benda. Ironisnya, penguasa sering menggunakan terror untuk mematahkan kekuatan masyarakat yang dinilai membangkang. Bahkan istilah teror dan terorisme digunakan sebagai suatu yang positif dalam pemerintahan Perancis tahun 1793-1794. (Pattiradjawane, 2001). Tetapi terorisme pasca tragedi 11 September 2001 menampilkan ciri-ciri baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Aksi terorisme saat ini melibatkan suatu jaringan global yang sulit dideteksi yang beroperasi di berbagai negara serta melakukan koordinasi dan perencanaan yang sistematis sebelum suatu rencana akan dilancarkan pada target serangan. Penggunaan teknologi yang canggih juga menjadi ciri terbaru dari aksi terorisme yang menggunakan internet untuk menyebarkan informasi pembuatan bom atau untuk memperlihatkan aksi teroris dalam mengeksekusi korban yang diculik untuk menyebarkan ketakutan dan kepanikan pada pihak lawan (Jemadu, 2008).

b. Bentuk-bentuk Terorisme

Menurut Hakim (2004), Bentuk-bentuk gerakan terorisme dilihat dari spiritnya dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain:

- 1) Gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme tapi terorisme selalu berkaitan dengan kekerasan politik. Gerakan kekerasan

politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan, secara sepihak oleh rezim yang berkuasa dianggap sebagai terorisme. Contoh gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme, yaitu di Aljazair, Palestina, dan beberapa negara jajahan pada masa kolonialisme.

- 2) Gerakan terorisme dengan semangat separatisme. Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teror karena kekerasan politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. Contoh Gerakan terorisme dengan semangat separatisme Gerakan terorisme dengan semangat radikalisme, yaitu IRA di Irlandia, Macan Tamil Eealam di Srilangka, MNLF di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan Gerakan Papua Merdeka di Indonesia.
- 3) Gerakan terorisme dengan radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, *National Islamic Front* di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia dan Al Qaeda yang berbasis di Afganistan.
- 4) Gerakan terorisme dengan semangat bisnis. Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis illegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis, yaitu *Narcoterrorism* di Myanmar dan *Yakuza* di Jepang.

Menurut *The US Nation Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism* (1996) , bentuk gerakan terorisme, antara lain:

- 1) Terorisme Politik (*Political Terrorism*) adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik. *commit to user*

- 2) Terorisme Nonpolitik (*Nonpolitical Terrorism*) adalah bentuk terorisme dengan kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (*Salvation*), maupun semata-mata karena kegilaan (*madness*).
- 3) Terorisme Pura-pura (*Quasi Terrorism*) adalah kegiatan incidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode teror untuk mendapatkan uang tebusan, seperti kasus pembajakan pesawat dan penculikan tokoh terkenal yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis.
- 4) Terorisme Politik Terbatas (*Limited Political Terrorism*) adalah gerakan teror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (*assassination*).
- 5) Terorisme Negara (*State or Official Terrorism*) adalah gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung, tetapi hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi terorisme. Contoh negara yang disebut sebagai *State Terrorism* adalah Libya dan Israel (Hakim, 2004:19-22).

Serangan terorisme 11 September 2001 di New York dan Washington memperlihatkan dimensi baru dalam evolusi konsep terorisme zaman modern. Skala serangan yang terjadi dan modus operandinya tidak pernah ada prediksinya dalam sejarah. Jumlah korban yang menjadi korban baik dari di gedung WTC maupun Pentagon menunjukkan bahwa kelompok terorisme memiliki kemampuan yang luar biasa dengan memanfaatkan kelengahan dari sistem pengawasan terhadap bandar udara dan penumpang pesawat terbang. Berdasarkan dari uraian diatas telah lahir bentuk-bentuk terorisme seperti: *nuclear terrorism, catastrophic terrorism, biological terrorism, dan chemical terrorism* (Jemadu, 2008).

c. Tujuan Terorisme

Menurut Chomsky, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan dari pemerintah (penguasa yang sedang memerintah) yang bertujuan untuk menjamin ketaatan dari rakyatnya. Dengan kata lain istilah itu digunakan untuk mrujuk pada kekuatan koersif (pemaksa/penekan) sebagai lawan dari persuasif (pembujuk) suatu rezim yang berkuasa (Sihbudi, M.Hamdan & Happy,1993). Berbeda dengan Chomsky, dalam kamus spionase menyebutkan tujuan terorime adalah sebuah aksi yang menggunakan kekuatan atau kekuatan yang tidak sah untuk mengintimidasi, memaksa, melawan dan bahkan membunuh orang, masyarakat, pemerintah untuk kepentingan politik atau tujuan sosial lainnya (Adjie, 2005:10-11).

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- 2) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- 3) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak (Dinduh dari situs www.buletinlitbang.dephan.go.id, tanggal 20 Februari 2013).

Tujuan terorisme adalah melumpuhkan otoritas dari sebuah pemerintahan di suatu negara sehingga setelah aksi terorisme tersebut, para teroris dapa menerapkan mazhab atau aliran yang dianut kelompok terorisme. Dalam aksinya terorisme tidak hanya melibatkan satu negara saja tapi juga melibatkan beberapa negara. Negara besar adalah sponsor teroris internasional sesungguhnya. Terorisme sekarang sudah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional. Kelompok atau group teroris

barangkali berasal dari salah satu negara, dibiayai oleh negara kedua, dilatih oleh negara ketiga dan diberi peralatan oleh negara keempat serta melakukan operasinya dinegara kelima (Adjie, 2005). Tidak jauh berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh Al Qaeda dimana para teroris Al Qaeda yang dilatih di Afganistan dan diberi pelengkapan senjata dengan uang yang diperoleh dari Osama bin Laden yang menghimpun biaya dari beberapa negara Islam dan melakukan operasinya di Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukung Amerika Serikat.

2. Politik Global

a. Pengertian Politik Global

Menurut Budihardjo (1982), “Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan suatu tujuan tertentu”(hlm.8).

Sementara menurut Koentjaraningrat (1977) pengertian politik yaitu “politik adalah sistem pengaturan, pembagian kekuasaan dari penguatan wewenang dalam masyarakat” (hlm.8). Kartini Kartono (1989) menjabarkan politik sebagai berikut:

“Politik adalah semua usaha dan perjuangan dengan menggunakan bermacam-macam alat, cara dan alternatif-alternatif tertentu yang berupa tingkat untuk menacapi tujuan tertentu dengan ide individu atau kelompok sebagai suatu sistem kewibawaan yang intregral. Politik sendiri mengandung konotasi kebijaksanaan kekuasaan negara, konflik, pembagian dan keadilan (hlm.10)”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk menentukan pilihan guna mencapai tujuan yang diinginkan, dengan menggunakan bermacam-macam alat, cara dan alternatif untuk mencapai tujuan dan mengatur pembagian kekuasaan.

Istilah politik global digunakan untuk menggantikan istilah lama politik internasional karena cakupannya yang tidak hanya membahas hubungan antar negara tetapi juga memperhitungkan keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berkiprah pada tataran global serta implikasinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Selain itu isu-isu global seperti proliferasi nuklir, terorisme, *energy security*, perubahan iklim, meningkatnya harga pangan, *good governance*, kemiskinan, penyebaran penyakit secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kepentingan semua aktor internasional baik negara maupun non-negara.

Akhir-akhir ini konsep *international society* yang mengacu pada kumpulan negara-negara berdaulat digantikan oleh konsep *world society* yang mencakup aktor negara maupun non-negara. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, politik mengandung beragam makna tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut perspektif realisme, politik adalah pertarungan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dan dominasi. Sedangkan menurut perspektif liberal atau pluralis, politik adalah pengorganisasian kekuasaan untuk menjamin dan mempromosikan kebebasan dan kesejahteraan individu maupun kelompok melalui penegakan hukum. Perspektif marxisme, melihat politik sebagai pelembagaan kekuasaan (negara) yang dijadikan instrumen oleh kelas kapitalis untuk mengeksploitasi kelas buruh. Politik juga diartikan sebagai dominasi atau eksploitasi negara-negara industri maju (Utara) atas negara-negara miskin (Selatan). Berbagai macam isu seperti isu terorisme global, pemanasan global, utang luar negeri, perdagangan bebas, hak azasi manusia, buruh migran, penyebaran penyakit menular dan lainnya (Jemadu, 2008).

Politik global adalah satu jaringan dan jejaring yang kompleks dari bermacam-macam agen, negara dan non negara, yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki kedekatan, juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbaharui, hilang atau muncul kembali, tergantung

pada luas pemakaian atas ide-idenya. Struktur bukanlah sebuah agregat kepentingan rasional yang stabil dan tumbuh secara linier. Struktur meliputi satu set ide tentang peranan, fungsi dan nilai-nilai yang diterima dan dijalankan. Struktur menjadi kelaziman karena banyak yang mempercayai bahwa memang itulah yang ada pada struktur itu. Setiap pengetahuan tentang struktur politik global harus dipelajari dari ide-ide yang menghubungkan elemen-elemennya yang kompleks secara lintas nasional dan memiliki kesalingterkaitan satu sama lainnya. (Diunduh dari situs www.Journal.Unair.ac.id, pada tanggal 21 Januari 2013)

Dalam Jurnal internasional yang berjudul *“The global war on terror, American foreign policy, and its impact on Islam and Muslim societies”* mengutip pendapat Huntington :

“Actually, some observers, intellectuals, politicians, and mass media in America state that 11th September event was the proof of Huntington thesis about the clash of civilizations. As we know, in his article which was published in Foreign Affairs on Summer 1993 with title The Clash of Civilizations?, Huntington asserted that a ‘clash of civilizations’ will dominate global politics’. He contends that the future conflict will occur between the West and several Islamic-Confucian states. Most of them do not believe Huntington’s thesis and thought that it was trashed article. Foreexample, they argued that the global politics was shaped and influenced by interests and states rather than culture or civilization. Theyalso reveal that civilizations could not control states, but states control

civilizations. However , when the attack of September 11 took place. many of intellectuals, observers, and mass media in America immediately changed their opinion about Huntington’s thesis. They statedSeptember 11 with the context of Islam, culture and civilizations.” (Sebenarnya, beberapa pengamat, intelektual, politisi, dan media massa di negara bagian Amerika 11 September adalah bukti tentang benturan peradaban. Seperti kita ketahui, dalam artikelnya yang diterbitkan pada berita Luar Negeri pada musim panas tahun 1993 dengan Judul *“Clash of Civilizations?”*, Huntington menegaskan bahwa 'benturan peradaban' akan mendominasi politik global. Dia berpendapat bahwa konflik di masa depan akan terjadi antara negara-negara Islam-Konfusianisme Barat dan beberapa. Kebanyakan dari beberapa pengamat mengungkapkan bahwa jalannya isi tesis Huntington dan berpikir bahwa itu menghancurkan artikel. Misalnya, mereka berargumen bahwa politik global dibentuk untuk mempengaruhi kepentingan negara daripada budaya atau

peradaban. Mereka juga mengungkapkan bahwa peradaban tidak bisa mengendalikan negara, tetapi negara mengendalikan peradaban. Namun, ketika serangan 11 September terjadi, banyak intelektual, pengamat, dan media massa di Amerika berserta sekutunya mengubah pendapat mereka tentang tesis Huntington. mereka menyatakan tragedi 11 September berhubungan dengan konteks Islam, budaya dan peradaban) (2011:209).

Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ide-ide yang dikembangkan dalam filsafat politik Barat. Secara tipikal para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial menghasilkan bayangan manusia dimana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan individu-individu dan individu-individu tersebut tidak mampu menerima ancaman sosial pada level yang tinggi. Ketakutan akan ancaman dan ketidakmampuan menerima kekacauan menjadi motif utama individu-individu untuk mengorbankan sebagian kebebasan, dengan tujuan menaikkan tingkat keamanan, dan pada proses inilah pemerintah dan negara muncul. Kerjasama multilateral juga dimunculkan dalam pemikiran tentang sifat alami, namun dengan penekanan-penekanan yang kuat pada tujuan-tujuan rasional manusia. Anarki, egoisme, *self interest* adalah konsep-konsep yang hampir selalu muncul untuk menjelaskan hubungan antar manusia maupun antar negara-negara (Hoffman,1999).

3. Konflik

a. Pengertian Konflik

Istilah konflik berasal dari kata *Confligere* yang berarti saling memukul. Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya (Hendropuspito, 1989). Sejalan dengan pendapat tersebut Kartini Kartono mengemukakan bahwa, “Konflik berasal dari kata *confligere* (*conflictum* berarti saling berbenturan), sehingga konflik adalah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang bertentangan (1989).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta konflik diartikan sebagai berikut: “*pertama*, pertentangan, percekocan; *kedua*,

ketegangan atau pertentangan cerita rekaan” (1990:45). Mengenai pengertian konflik, banyak ahli yang memberikan definisi atau arti. Menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah: proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (1985). Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan nilai-nilai dari pihak yang bertikai. Seperti yang dikatakan oleh Ariyono Suyono bahwa konflik adalah keadaan dimana dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tujuan masing-masing pihak karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak (1985).

Menurut Johnson pengertian konflik pada umumnya mengarah kepada kepentingan-kepentingan kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial yang terus-menerus (1986). Holtzi merumuskan definisi konflik secara singkat dan jelas yaitu ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan atau pandangan antara dua pihak atau lebih (1988). Menurut Lewis mengemukakan bahwa konflik, yaitu perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan pihak lawan (Verger, 1990: 211). Ahmadi mengemukakan bahwa konflik pada dasarnya adalah usaha yang disengaja untuk menentang, melawan atau memaksa kehendak terhadap orang lain. Namun ada istilah lain yang mempunyai arti yang sama dengan istilah konflik yaitu istilah pertikaian (1975).

Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan, pertikaian dan perbedaan pendapat antar dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain. Konflik merupakan pertentangan yang lahir akibat adanya perbedaan, karena secara natural antar individu dan antar individu dan antar kelompok masyarakat memiliki perbedaan, maka kemungkinan timbulnya konflik-konflik di antara mereka tak bisa dihindarkan. Secara teoritis, dinamika konflik bergerak laksana bola salju yang akan membesar dan meningkatkan intensitasnya bila tak terdamaikan. Pada tahap awal, konflik dimulai dari ringan yang mengejawantah dalam bentuk perbedaan pendapat atau kehendak.

Kalau perbedaan-perbedaan ini tidak dicarikan titik temunya, maka konflik akan bergerak menjadi bentuk konflik yang berkadar menengah dan melahirkan aksi-aksi protes, demonstrasi atau pun petisi. Apabila konflik bertaraf menengah ini tetap tidak bisa diselesaikan maka akan bergerak menjadi bentuk konflik yang berkadar tinggi dan melahirkan tindakan kekerasan politik seperti makar, kudeta, gerakan separatis dan perang fisik.

b. Sebab-sebab Terjadinya Konflik

Konflik pada hakekatnya merupakan gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat oleh karenanya melekat pula di dalam kehidupan setiap bangsa (Nasikun, 1993 :21). Konflik biasanya didahului oleh adanya permasalahan yang mengakibatkan pertentangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa “Konflik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sebab konflik adalah bentuk interaksi sosial yaitu terjadinya usaha-usaha pihak yang satu menjatuhkan pihak yang lain karena terjadi perbedaan pendapat (1982:101). Menurut Handoko penyebab terjadinya konflik (1992) adalah:

Pertama, Komunikasi yang merupakan salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu pemimpin yang tidak efektif; *kedua*, Struktur yaitu pertarungan kekuasaan dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka; *ketiga*, Pribadi yang berarti ketidaksesuaian tujuan nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau bawahan dengan perilaku yang diperankan atasan (hlm.131).

Soesanto (1983) mengatakan bahwa konflik sering terjadi disebabkan oleh:

- 1) Ketidaksepahaman dalam anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang semula menjadi pegangan kelompok.
- 2) Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
- 3) Norma-norma kelompok yang dihayati oleh para anggotanya bertentangan satu sama lain.

- 4) Sanksi yang ada dalam norma itu sudah lemah dan tidak dilaksanakan dengan konsekuen.
- 5) Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok.

Schwartz dalam Legowo (1985) menyatakan penyebab atau sumber konflik dalam masyarakat politik (negara) konflik dinilai sering terjadi karena nilai umum, sebagian atau seluruhnya tidak mencakup nilai-nilai pribadi yang diyakini kebenarannya oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Dengan kata lain nilai pribadi tersebut tidak bisa diterima oleh sistem nilai umum yang berlaku. Bila hal itu dipaksakan maka akan terjadi benturan nilai yang bisa menimbulkan konflik. Pribadi atau kelompok yang mengalami benturan nilai akan merasa terasing atau mengasingkan diri dari sistem yang berlaku. Dalam politik hal semacam ini disebut sebagai "keterasingan politik" (*political alienation*). Keterasingan politik ini selanjutnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok dalam tatanan kehidupan politik masyarakat.

Handoko (1992) menyebutkan penyebab terjadinya konflik sebagai berikut:

- 1) Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu pemimpin yang tidak efektif.

- 2) Struktur

Pertarungan kekerasan dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

- 3) Pribadi

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau bawahan dengan perilaku yang diperankan atasan dan perbedaan nilai-nilai atau persepsi. *commit to user*

c. Tujuan Konflik

Tujuan konflik menurut Hendropuspito adalah pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan dikuasai oleh keinginan untuk mencapai suatu hasil yang dipersengketakan (1989). Sedangkan menurut Nasution konflik dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang menguasai suatu masalah yang dipertentangkan. Konflik dengan hegemoni bertujuan untuk mendominasi. Para pelaku konflik tidak hanya semata-mata menunjukkan perhatian kepada satu sasaran tertentu melainkan kepada berbagai sasaran dan berusaha mencapai keunggulan sebanyak mungkin (1989).

Sedangkan menurut Conn menyebutkan tujuan konflik sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak yang bertikai dalam konflik mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan, semisal memperebutkan kekuasaan, sehingga masing-masing berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.
- 2) Salah satu pihak ingin mendapatkan sedangkan pihak yang lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki atau diyakini.
- 3) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mempertahankan apa yang
- 4) Telah ada agar tidak terlepas ke tangan orang lain (Sastroatmojo, 1995:244).

Konflik antar negara mempunyai tujuan antara lain masing-masing negara yang bertentangan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan yang dimiliki agar tidak jatuh ke tangan pihak lain. Negara yang terlibat konflik bertujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka serta mendapat keadilan dari suatu masalah yang dipertentangkan.

d. Macam-Macam Konflik

Menurut Surbakti (1992), menyebutkan dua macam konflik, yaitu :

- 1) Konflik yang berwujud kekerasan.

commit to user

Pada umumnya terjadi dalam masyarakat atau negara yang belum memiliki konsensus dasar dan tujuan negara mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Contohnya : huru-hara, kudeta, pembunuhan, terorisme, pemberontakan dan sparatisme.

2) Konflik yang tak berwujud kekerasan

Pada umumnya ditemui dalam masyarakat atau negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Contohnya : demonstrasi atau unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi, pembangkangan sipil, dan dialog (hal.149).

Konflik kedua ini adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan jalan kompromi maupun kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak, walaupun hasilnya tidak optimal.

Ahmadi (1975) menyatakan bahwa dipandang dari segi terjadinya, maka konflik ada dua macam, yaitu :

- 1) *Corporate conflict* yaitu konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok lain dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat.
- 2) *Personal conflict* yaitu konflik yang terjadi antara individu dengan individu. *Personal conflict* disebabkan karena prestise, kekuasaan, dan kekayaan (hal.94).

Apabila dilihat dari sudut konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, Saifuddin (1986) membagi konflik dalam dua macam yaitu:

- 1) Konflik realistik, yakni konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu.
- 2) Konflik non realistik, yakni konflik itu sendiri sebagai tujuan, tidak dikondisikan pada objek tertentu dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan (hal.64).

Menurut Holtsi enam tipe utama tujuan atau sumber konflik (1988), yaitu:

Pertama, konflik wilayah terbatas. Konflik ini di dalamnya terdapat pandangan yang cocok dengan acuan pemikiran suatu bagian khusus wilayah dekat negara lain; *kedua*, konflik yang berkaitan dengan posisi pemerintah. Tipe ini sering mengandung nada tambahan ideologi yang kuat, maksudnya menjatuhkan rezim sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak mereka yang melakukan intervensi; *ketiga*, Konflik kehormatan nasional, Tipe konflik ini pemerintah mengancam atau bertidak untuk membersihkan suatu pelanggaran tertentu yang telah diduga. Konflik ini biasanya dari skala kecil menjadi skala besar; *keempat*, imperialisme regional. Tipe ini didalamnya terdapat usaha pemerintah suatu negara untuk menghancurkan negara lain, biasanya demi kombinasi tujuan ideologi, keamanan dan perdagangan; *kelima*, konflik pembebasan atau perang revolusioner, yaitu perang yang dilakukan oleh suatu negara untuk pembebasan rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis dan ideology; *keenam*, konflik yang timbul dari tujuan pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang pecah (hlm 71).

Melihat pengertian macam-macam konflik di atas, konflik Amerika-Afganistan yang melibatkan kelompok Al Qaeda, adalah termasuk konflik imperialisme regional karena Amerika berusaha menghancurkan Afganistan demi menangkap Osama bin Laden dan Al Qaeda.

e. Cara Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial, namun konflik tidak harus berkepanjangan. Motivasi untuk mengakhiri konflik bisa karena lelah atau bosan dan keinginan untuk mencurahkan tenaganya ke hal-hal lain. Menurut Simmel “Bentuk atau cara untuk mengakhiri konflik yakni menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, kompromi, perdamaian, dan ketidakmungkinan untuk berdamai” (Johnson, 1986 : 273).

Menurut Hendropuspito ada prosedur yang lazim untuk penyelesaian konflik (1989), yaitu:

Pertama, konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta pihak ketiga. Pihak ketiga hanya sebagai pemberi pertimbangan yang dianggap baik oleh kedua pihak; *kedua*, mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan seorang mediator (perantara).

Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat, keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan; *ketiga*, arbitrase, yaitu suatu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan dengan seorang hakim sebagai pengambil keputusan. Seorang arbitrator memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, dan keputusan seorang hakim yang harus ditaati; *keempat*, paksaan, ialah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, digunakan paksaan secara fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan ialah pihak yang kuat, yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah; *kelima*, *Détente*, yaitu mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian (hlm. 248).

Cara ini merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah perdamaian. Menurut Rauf (2001), ada dua cara yang lazim digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu :

1) Penyelesaian secara persuasif

Adanya penggunaan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang bertikai.

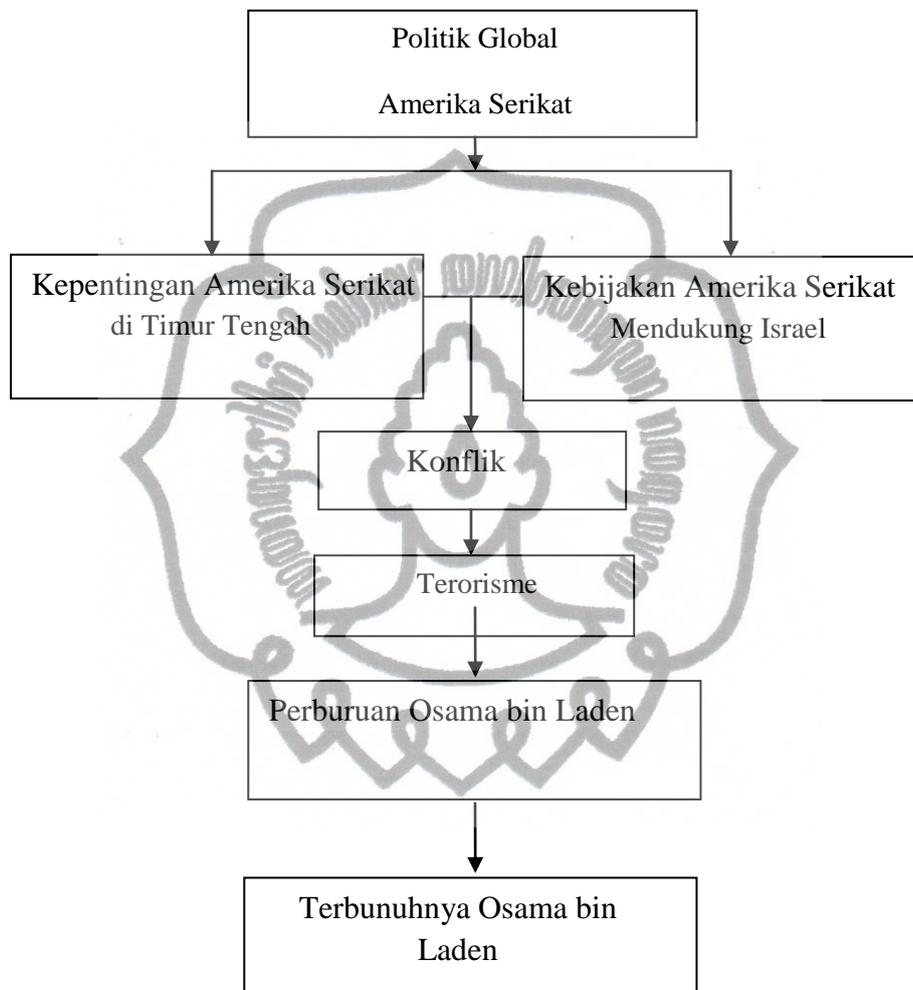
2) Penyelesaian secara koersif

Adanya penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik (hal.10-11).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik pada hakekatnya dapat ditempuh dengan jalan damai (perundingan), pendekatan pengurangan ketegangan, dan penggunaan kekerasan fisik. Konflik antara Negara dengan kelompok tertentu dapat diselesaikan dengan cara diplomasi yang dilakukan dengan mempertemukan yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama yakni berdamai maupun bekerjasama dengan baik dalam mengatasi masalah-masalah negara yang bersangkutan. Keputusan yang diambil harus adil

bagi kedua pihak yang berkonflik untuk menghindari perang terbuka. Pihak yang terlibat konflik harus berusaha melaksanakan keputusan yang disetujui bersama.

B. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian tentang
Perlawanan Osama bin Laden terhadap
Amerika Serikat

Keterangan :

Letak Timur Tengah yang strategis dan mempunyai sumber minyak yang melimpah menjadi incaran banyak negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat. Politik global yang dilakukan Amerika Serikat berkaitan dengan kepentingannya di Timur Tengah, seperti menguasai dan mengeksploitasi sumberdaya minyak yang dimiliki

oleh Negara Islam. Pada tahun 1990 Amerika Serikat membangun pangkalan militer permanen di Arab Saudi sebagai salah satu wujud bahwa AS sudah mulai menguasai Negara Islam karena Arab Saudi merupakan Negara berstatus khusus sebagai pelindung tanah suci.

Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang mendukung kejahatan Israel dalam menguasai Palestina merupakan salah satu cara Amerika Serikat menguasai minyak di Timur Tengah. Banyak pihak tidak terkecuali Osama bin Laden mengecam dukungan Amerika Serikat yang mendukung Israel melakukan pembantaian, serangan keji dan destruktif selama bertahun-tahun serta melakukan penistaan kepada orang Palestina.

Apabila orang Islam yang mengalami penderitaan akibat kemiskinan berani mengeluarkan satu saja ucapan, bentuk protes atas penindasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka (Barat dan Amerika Serikat) menyebut orang Islam tersebut dengan sebutan teroris. Bentuk protes dari setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan sehingga menjadi sumber kegeraman dan keputusan hingga memunculkan serangan bunuh diri di berbagai negara yang mendukung Amerika Serikat dan yang menjadi insiden terparah yang dialami oleh AS terjadi pada tanggal 11 September 2001. Gedung menara kembar *World Trade Center* (WTC) dan pentagon yang terletak di New York dan Washington DC sebagai simbol peradaban kapitalis sekaligus perlambang arogansi Amerika Serikat sebagai sang Adikuasa luluh lantak akibat serangan teroris.

Di masa pemerintahan Presiden Bush, Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden dan kelompoknya Al Qaeda sebagai teroris yang bertanggung jawab atas insiden 11 September 2001 tersebut. Selanjutnya perintah invasi ke Afghanistan dikeluarkan oleh Presiden Bush terhadap teroris Al Qaeda yang bersembunyi di Afghanistan di bawah naungan Taliban. Amerika Serikat dalam invasinya ke Afghanistan, meneriakkan slogan perang melawan terorisme dan mewujudkan pemerintahan yang kuat. Invasi itu berhasil menggulingkan Taliban dan membuka proses politik baru di Afghanistan.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Obama menghadapi persoalan yang begitu pelik dan kompleks di Afghanistan. Karena semasa Pemerintahan George W. Bush pada tahun 2001, Presiden Bush mengeluarkan perintah invasi ke Afghanistan dengan slogannya pada dunia “bergabung dengan kami atau menghadapi kematian dan kehancuran” yang alasannya untuk menumpas milisi Taliban dan terorisme. Persoalan warisan mantan Presiden Bush inilah yang akan diselesaikan oleh Presiden Obama dengan politik luar negerinya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan Afghanistan dan operasi penumpasan teroris di dalam Afganistan dan di sepanjang perbatasan menjadikan Afghanistan adalah tantangan yang besar bagi pemerintahan AS di bawah Presiden Obama. Militan Afghanistan memperlihatkan kemampuan mereka menghadapi pasukan AS dan NATO meski secara persenjataan AS dan NATO jauh lebih unggul. Namun, militan Afghanistan yaitu Taliban dan Al Qaeda mampu menyelesaikan tiap operasi militer yang mereka rencanakan dengan baik yang hasilnya selalu saja ada korban dari pihak AS dan NATO setiap harinya. Hal inilah yang membuat AS di bawah Presiden Obama seperti kebakaran jenggot dalam melaksanakan kebijakannya di Afghanistan yang mereka sebut dengan perang melawan teror.

